

**EVALUASI TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH MELALUI ANALISIS RASIO KEUANGAN APBD DALAM
RANGKA MEMBIAYAI PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH**

**Oleh :
Endah Kusuma Dewi
F.1301048**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah khususnya Pemerintah Daerah Kota Surakarta, Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri dan membandingkannya untuk mengetahui daerah mana yang dapat dikatakan lebih mampu membiayai kebutuhan rumah tangganya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder dengan kurun waktu lima tahun yaitu tahun 1998/1999-2002.

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis rasio komponen pendapatan daerah, rasio komponen belanja rutin daerah, rasio komponen belanja pembangunan daerah, rasio kemandirian daerah, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata proporsi atau komposisi masing-masing komponen pendapatan daerah di Kota Surakarta adalah 19,80 persen untuk PAD; 7,24 persen untuk bagi hasil pajak dan bukan pajak; 62,66 persen untuk sumbangan dan bantuan. Sedangkan rata-rata rasio PAD terhadap belanja rutin adalah 28,09 persen dan terhadap belanja pembangunan adalah 116,79 persen. Rata-rata rasio kemandirian sebesar 26,84 persen. Rata-rata rasio keserasian sebesar 72,41 persen untuk belanja rutin dan 20,88 persen untuk belanja pembangunan. Tingkat pertumbuhan rata-rata masing-masing komponen pendapatan dan belanja daerah adalah 22,65 persen untuk PAD; 41,30 persen untuk bantuan pemerintah pusat dan pinjaman; 104,08 persen untuk bagi hasil pajak dan bukan pajak; 44,56 persen untuk sumbangan dan bantuan; 35,70 persen untuk total pendapatan daerah; 46,21 persen untuk belanja rutin dan 70,96 persen untuk belanja pembangunan. Adapun rata-rata proporsi atau komposisi masing-masing komponen pendapatan daerah di Kabupaten Klaten adalah 5,31 persen untuk PAD; 4,53 persen untuk bagi hasil pajak dan bukan pajak; 87,79 persen untuk sumbangan dan bantuan. Sedangkan rata-rata rasio pendapatan asli daerah terhadap belanja rutin adalah 6,40 persen dan terhadap belanja pembangunan adalah 42,38 persen. Rata-rata rasio kemandirian sebesar 5,76 persen. Rata-rata rasio keserasian sebesar 83,38 persen untuk belanja rutin dan 12,72 persen untuk belanja pembangunan. Tingkat pertumbuhan rata-rata masing-masing komponen pendapatan dan belanja daerah adalah 25,11 persen untuk PAD; 41,59 persen untuk bantuan pemerintah pusat dan pinjaman; 17,32 persen untuk bagi hasil

pajak dan bukan pajak; 43,3 persen untuk sumbangan dan bantuan; 40,40 persen untuk total pendapatan daerah; 42,57 persen untuk belanja rutin dan 30,18 persen untuk belanja pembangunan. Sedangkan rata-rata proporsi atau komposisi masing-masing komponen pendapatan daerah di Kabupaten Wonogiri adalah 8,15 persen untuk PAD; 5,07 persen untuk bagi hasil pajak dan bukan pajak; 82,66 persen untuk sumbangan dan bantuan. Sedangkan rata-rata rasio pendapatan asli daerah terhadap belanja rutin adalah 10,78 persen dan terhadap belanja pembangunan adalah 44,94 persen. Rata-rata rasio kemandirian sebesar 9,32 persen. Rata-rata rasio keserasian adalah sebesar 75,76 persen untuk belanja rutin dan 17,96 persen untuk belanja pembangunan. Tingkat pertumbuhan rata-rata masing-masing komponen pendapatan dan belanja daerah adalah 20,98 persen untuk PAD; 38,63 persen untuk bantuan pemerintah pusat dan pinjaman; 18,99 persen untuk bagi hasil pajak dan bukan pajak; 40,12 persen untuk sumbangan dan bantuan; 37,09 persen untuk total pendapatan daerah; 38,27 persen untuk belanja rutin dan 31,15 persen untuk belanja pembangunan.

Kesimpulan penelitian ini bahwa hasil analisis menunjukkan Kota Surakarta dapat dikatakan lebih mampu membiayai kebutuhan rumah tangganya jika dibandingkan dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Wonogiri. Apabila Kabupaten Klaten dibandingkan dengan Kabupaten Wonogiri maka, yang dapat dikatakan lebih mampu membiayai kebutuhan rumah tangganya adalah Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan temuan tersebut, maka saran yang dapat direkomendasikan adalah pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan dalam hal pembiayaan dari pusat, sehingga meningkatkan otonomi daerah dan keleluasaan daerah (*local discretion*). Langkah penting yang harus dilaksanakan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah menghitung potensi PAD yang riil dimiliki daerah secara sistematis dan rasional.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sebagaimana tertuang dalam undang-undang nomor 22 dan 25 tahun 1999 telah mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2001. Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal ini menandai dimulainya sebuah babak baru dalam pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya – sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk mewujudkan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Terlepas dari perdebatan mengenai ketidaksiapan pemerintah di berbagai bidang untuk melaksanakan kedua undang-undang tersebut, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diyakini merupakan jalan terbaik dalam rangka mendorong pembangunan daerah, menggantikan konsep pembangunan terpusat yang oleh beberapa pihak dianggap sebagai penyebab lambannya pembangunan di daerah dan semakin membesarnya ketimpangan antar daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yang berarti adanya keleluasaan bagi daerah untuk mengembangkan potensi penerimaan daerah pada satu sisi, dan keleluasaan untuk menyusun daftar prioritas pembangunan di sisi lainnya, akan dapat mendorong percepatan pembangunan daerah.

Konsep desentralisasi memunculkan sebuah entitas yang berkarakteristik seperti adanya partisipasi, memiliki visi yang strategis, *rule of law*, transparansi, bertanggung jawab, serta efektif dan efisien. Karakteristik tersebut berguna untuk mencapai tujuan desentralisasi yaitu adanya pengelolaan daerah yang sesuai dengan konteks kedaerahan.

Dengan adanya paket undang-undang otonomi daerah merupakan implikasi bahwa daerah dituntut untuk melakukan penataan kembali kelembagaan (restrukturisasi) pemerintah daerah, sehingga mampu memberdayakan segenap potensi yang dimiliki daerah dan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan daerah. Penyelenggaraan otonomi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan respon pemerintah terhadap aspirasi masyarakat di daerah untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah untuk mengelola keuangan pemerintah daerah sesuai dengan potensi sumber daya daerah.

Di masa lalu, khususnya pada dekade tahun 1980 kebanyakan pemerintah daerah di Indonesia mengalami kesulitan karena ketidakmampuannya untuk memperkirakan besaran bantuan atau subsidi pemerintah pusat dari tahun ke tahun. Hal ini karena sangat tergantungnya pemerintah daerah terhadap bantuan atau subsidi, sehingga secara nyata memberikan dampak yang kurang baik terhadap kemampuan daerah untuk melakukan perencanaan dan pemrograman pengeluaran sektor publik

secara efektif. Untuk memecahkan masalah ini dan mengakhiri campur tangan pemerintah pusat yang berlebihan terhadap wewenang pemerintah lokal dalam melaksanakan fungsinya, suatu undang-undang pemerintah daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah telah berhasil diundangkan oleh pemerintah Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan format kedua undang-undang tersebut, dimana kewenangan dalam politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, dan moneter atau fiskal, serta bidang lain yang bersifat strategis, disertai rasional, transparan, partisipatif, akuntabel, dan kepastian dalam keuangan daerah diharapkan akan memberikan konsekuensi yang positif terhadap pemberdayaan pemerintah daerah.

Masalah kemampuan keuangan daerah merupakan suatu dilema bagi daerah otonom. Di satu pihak, dengan prinsip otonomi daerah, undang-undang mewajibkan daerah yang bersangkutan untuk mengurus rumah tangganya sendiri, baik urusan rutin maupun tugas-tugas dalam pembangunan daerah. Tetapi di lain pihak, justru pembiayaan urusan rutin rumah tangga daerah otonom ini yang harus dibantu oleh pemerintah pusat. Potensi daerah sangat menentukan dalam usaha meningkatkan kemampuan keuangan daerah bagi penyelenggaraan rumah tangganya. Sekarang banyak ditemukan bahwa antara beban tugas yang harus dikerjakan oleh daerah tidak seimbang atau tidak konsisten dengan kondisi serta situasi keuangan daerah itu sendiri. Kewajiban otonomi tersebut membutuhkan biaya yang seharusnya disediakan

sendiri oleh daerah dari sumber keuangan yang telah dilimpahkan oleh pemerintah pusat dan sumber lain yang ada di daerah.

Kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) adalah perkiraan pendapatan dan pengeluaran satu tahun guna membiayai program-program pemerintah danantisipasi sumber-sumber penerimaan satu tahun yang akan datang (Sidik, 2001 : 162). APBD secara langsung maupun tidak langsung dapat dijadikan cermin kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangan daerah, membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat, sehingga untuk mengetahui kemandirian keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan suatu analisa terhadap kinerja pemerintah daerah yang bersangkutan dalam mengelola keuangan daerahnya dengan menggunakan suatu alat penilaian berupa analisis rasio keuangan APBD. Analisis rasio keuangan APBD ini diharapkan dapat menjadi tolok ukur dalam :

1. menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
2. mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
3. mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
4. mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.

5. melihat pertumbuhan perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Penggunaan rasio keuangan pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel analisa rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan. Meskipun demikian kaidah pengakuntasian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta. Hal ini karena alasan berikut ini:

1. Keterbatasan penyajian laporan keuangan pada lembaga pemerintah daerah yang sifat dan cakupannya berbeda dengan penyajian laporan keuangan oleh lembaga perusahaan bersifat komersial.
2. Selama ini penyusunan APBD sebagian masih dilakukan berdasarkan pertimbangan *incremental budget* yaitu besarnya masing-masing komponen pendapatan dan pengeluaran dihitung dengan meningkatkan sejumlah prosentase tertentu (biasanya berdasarkan tingkat inflasi). Oleh karena disusun dengan pendekatan secara *incremental* maka seringkali mengabaikan bagaimana rasio keuangan dalam APBD.
3. Penilaian keberhasilan APBD sebagai penilaian pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah, lebih ditekankan pada pencapaian target, sehingga kurang memperhatikan bagaimana perubahan yang terjadi pada komposisi ataupun struktur APBD-nya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kemandirian atau kemampuan keuangan pemerintah daerah sangat menentukan dalam penyelenggaraan tugas, kewajiban dan kewenangan pemerintah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, serta merupakan ciri pokok terhadap pengembangan otonomi daerah yang dititikberatkan pada daerah tingkat II. Otonomi daerah pada prinsipnya memberi wewenang kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, disamping mempunyai hak untuk mendapat bantuan dari pemerintah pusat sesuai dengan kemampuan pemerintah pusat atau dengan perkataan lain subsidi dari tingkat pemerintahan atasan menjadi kurang penting dan sumber pendapatan sendiri menjadi sumber pendapatan utama.

Wacana tentang prinsip otonomi daerah yang pada akhirnya berimplikasi pada daerah khususnya pemerintah daerah menjadikan topik yang menarik untuk diikuti perkembangannya dan diteliti lebih lanjut. Berkaitan dengan hal ini, penulis mengambil judul skripsi, **EVALUASI TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI ANALISIS RASIO KEUANGAN APBD DALAM RANGKA MEMBIAYAI PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai rumah tangganya khususnya Pemerintah Daerah Surakarta, Pemerintah Daerah Klaten

dan Pemerintah Daerah Wonogiri apabila ditinjau dari analisis rasio keuangan APBD tahun anggaran 1998/1999 - 2002.

2. Diantara pemerintah daerah tersebut, pemerintah daerah mana yang telah mampu membiayai kebutuhan rumah tangganya dalam rangka melaksanakan otonomi daerahnya.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah perlu dilakukan untuk memfokuskan penelitian pada pokok permasalahan, mencegah terlalu meluasnya pembahasan dan mencegah terjadinya salah interpretasi terhadap kesimpulan yang dihasilkan. Pembatasan masalah yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Proporsi masing-masing komponen pendapatan dan belanja daerah.

Analisis komponen pendapatan daerah yang dilakukan adalah melihat proporsi atau komposisi pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak, sumbangan dan bantuan terhadap total pendapatan daerah. Sedangkan komponen belanja adalah melihat proporsi atau komposisi antara pendapatan asli daerah terhadap belanja rutin maupun terhadap belanja daerah.

2. Tingkat kemandirian keuangan daerah dari pihak ekstern.

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

3. Pertumbuhan masing-masing komponen anggaran pendapatan belanja daerah.

Mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.

4. Kesenjangan antara belanja rutin dan belanja pembangunan

Menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal.

5. Penelitian ini meliputi Pemerintah Daerah Surakarta, Pemerintah Daerah Klaten, dan Pemerintah Daerah Wonogiri.

Berdasarkan data keuangan, realisasi total pendapatan daerah Pemerintah Daerah Surakarta, Klaten dan Wonogiri cenderung naik atau mengalami peningkatan selama lima tahun periode yaitu tahun anggaran 1998/1999 sampai dengan tahun anggaran 2002. Total pendapatan daerah (TPD) rata-rata Pemerintah Daerah Klaten selama tahun 1998/1999-2002 sebesar Rp.218.518.537.000,00 dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 40,40 persen. Pemerintah Daerah Wonogiri mempunyai total pendapatan daerah (TPD) rata-rata sebesar Rp. 187.057.541.000,00 dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 37,09 persen. Sedangkan total pendapatan daerah (TPD) rata-rata Pemerintah Daerah Surakarta adalah sebesar Rp.152.363.674.000,00 dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 46,21 persen.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Menilai kemampuan atau kemandirian keuangan pemerintah daerah melalui analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam membiayai kebutuhan rumah tangganya demi pelaksanaan otonomi daerah.
2. Mengevaluasi kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai rumah tangganya demi pelaksanaan otonomi daerahnya.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini akan membuka wawasan baru berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan sebagai masukan berharga guna pengambilan keputusan serta kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerahnya demi terwujudnya kemandirian daerah.
2. Bagi para akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memperluas cakrawala untuk menemukan dimensi-dimensi baru dalam bidang ilmu akuntansi sektor publik.
3. Bagi para peneliti, penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

F. Sistematika Penulisan

Tahapan penulisan skripsi ini, penulis membaginya menjadi lima rangkaian bab.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah yang merupakan landasan pemikiran secara garis besar dengan pengamatan yang menimbulkan minat atau memotivasi penulis untuk lebih mendalaminya dengan melakukan suatu penelitian. Dalam bab ini juga akan diuraikan perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan beberapa acuan teori dan teknik analisis yang akan menjadi dasar dalam pembahasan evaluasi kemandirian keuangan pemerintah daerah dalam membiayai rumah tangganya.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam bab ini juga akan diuraikan mengenai ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data, pembatasan variabel serta sistematika penulisan yang menggambarkan secara umum pokok pembahasan skripsi.

BAB IV : ANALISIS DATA

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi data, hasil penelitian tentang hasil pengolahan data dan interpretasi data. Bab ini juga akan menguraikan gambaran secara umum Kota Surakarta, Kabupaten Klaten dan Kabupaten

Wonogiri meliputi keadaan geografis, keadaan penduduk, keadaan ekonomi (pertumbuhan PDRB perkapita) dan APBD.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis akan berusaha mengambil kesimpulan berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah yang bersangkutan dan bagi penelitian berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II LANDASAN TEORI

A. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. Kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam APBD yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Sesuai dengan UU No.22 / 1999 Pasal 1 (13), APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sedangkan menurut Nefi (2002 : 4) APBD adalah suatu perencanaan di bidang keuangan yang menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran daerah untuk membiayai keperluan-keperluan daerah dalam tahun anggaran.

Penyusunan APBD yang hingga sekarang ini masih berlaku, mengacu pada norma dan prinsip anggaran yang meliputi (Mulyanto, 2001 : 4)

1. **Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran.** Transparansi anggaran merupakan salah satu persyaratan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Dana yang di peroleh penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

2. Disiplin Anggaran. Penyusunan APBD harus dilakukan atas asas efisiensi, tepat guna waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan, setiap penganggaran pengeluaran harus didukung adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.
3. Keadilan anggaran. Pemerintah wajib mengalokasikan penggunaan dana penerimaan secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.
4. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran. Dana yang tersedia dalam APBD harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat.

Bila dilihat secara menyeluruh, komponen APBD dalam garis besarnya terbagi menjadi tiga (3) kelompok utama, yaitu:

1. Anggaran pendapatan, terdiri dari bagian sisa tahun lalu, pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah.
2. Belanja rutin, terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja lain-lain, dan sebagainya.
3. Belanja pembangunan, terdiri dari industri, pertanian dan kehutanan, sumber daya air dan irigasi, tenaga kerja dan sebagainya.

Ada sinyalemen yang berkembang saat ini, bahwa mulai tahun 2006 penyusunan APBD masing-masing pemerintah daerah harus sudah menggunakan pendekatan kinerja. Maksud dari pendekatan kinerja yakni bahwa penyusunan APBD menggunakan sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja

(output) atas dasar perencanaan alokasi biaya (input) yang telah ditetapkan. Di samping itu, setiap penganggaran dalam pos pengeluaran dalam APBD harus didukung oleh adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup (Mulyanto, 2001:12). Dalam format yang baru, pos dalam APBD terdiri dari 3 (tiga) komponen pokok, yaitu:

1. Pendapatan Daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan yang sah.
2. Belanja Daerah terdiri dari belanja administrasi umum; belanja operasi, pemeliharaan sarana dan prasarana umum; belanja modal; serta belanja tidak terduga.
3. Pembiayaan. Dari sisi pengertiannya pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi pada tahun anggaran tertentu. Berbagai macam pungutan dalam pos penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Sedang semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dilakukan sesuai dengan jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Oleh karena itu, APBD menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.

B. Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Dalam mengadakan analisis seorang analis keuangan memerlukan ukuran tertentu. Ukuran yang sering digunakan dalam analisis keuangan adalah rasio. Helfert (2000 : 49) mengartikan rasio adalah suatu angka yang menunjukkan hubungan antara suatu unsur dengan unsur lainnya dalam laporan keuangan.

Penggunaan analisis rasio pada sektor publik, khususnya APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan mengenai nama dan jenis pengukuran yang baku. Namun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel; analisis rasio keuangan perlu dilakukan walaupun aturan akuntansi mengenai APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan.

Rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui kecenderungan yang terjadi. Selain itu, dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu Pemerintah Daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun potensi daerah tersebut terhadap Pemerintah Daerah lain. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan APBD ini adalah :

1. DPRD sebagai wakil dari pemilik daerah (masyarakat).
2. Pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD tahun berikutnya.
3. Pemerintah Pusat atau propinsi sebagai bahan masukan dalam pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

4. Masyarakat dan kreditor, sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemerintah daerah bersedia memberi pinjaman ataupun membeli obligasi.

Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain sebagai berikut:

1. Rasio Komponen Pendapatan Daerah

Alat analisis yang digunakan untuk melihat proporsi masing-masing komponen pendapatan daerah di formulasi menjadi (Soeratno dan Yunasman, 2002:49).

$$RKPD = \frac{\text{PAD atau BHPBP atau SUMBANT}}{\text{TPD}} \times 100 \% \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan :

RKPD : rasio komponen pendapatan daerah.

PAD : pendapatan asli daerah.

BHPBP : bagi hasil pajak dan bukan pajak.

SUMBANT : sumbangan dan bantuan.

Pendapatan asli daerah (PAD) yaitu pendapatan yang bersumber dari: pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah, penerimaan lain-lain. Bagi hasil pajak dan bukan pajak (BHPBP) adalah penerimaan bagi hasil dari pemerintah tingkat propinsi dan dari pemerintah pusat. Sedangkan komponen penerimaan sumbangan dan bantuan (SUMBANT) adalah penerimaan dari pemerintah pusat untuk pembiayaan belanja pegawai, belanja rutin non pegawai dan belanja pembangunan. Dengan kata lain, pendapatan yang bersumber dari: subsidi daerah otonom, DAU, DAK, bantuan pembangunan dan penerimaan lainnya. Adapun

komponen total pendapatan daerah (TPD) adalah jumlah penerimaan daerah yang berasal dari sisa lebih anggaran tahun lalu, pendapatan asli daerah, penerimaan BHPBP dan penerimaan yang berasal dari sumbangan atau bantuan (bagian pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah dan atau instansi yang lebih tinggi atau dikenal dengan sebutan dana perimbangan) serta pinjaman.

2. Rasio Komponen Belanja Rutin Daerah dan Rasio Komponen Belanja Pembangunan Daerah.

Alat analisis yang digunakan untuk melihat proporsi pendapatan asli daerah dengan belanja rutin dan pembangunan di formulasi (Soeratno dan Yunasman, 2002:49) menjadi.

$$RKBRD = \frac{PAD}{BR} \times 100 \% \dots\dots\dots(2)$$

$$RKBPD = \frac{PAD}{BP} \times 100 \% \dots\dots\dots(3)$$

Keterangan :

RKBRD : rasio kemampuan belanja rutin daerah.

RKBPD : rasio kemampuan belanja pembangunan daerah.

BR : belanja rutin.

BP : belanja pembangunan.

Belanja rutin adalah pengeluaran yang berasal dari: belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja lain-lain, pengeluaran yang tidak disangka dan sebagainya, yang tercantum sebagai belanja rutin dalam

APBD. Sedangkan belanja pembangunan adalah pengeluaran yang berasal dari: sektor industri, sektor pertanian dan kehutanan, sektor sumber daya air dan irigasi, sektor tenaga kerja, sektor transportasi dan sebagainya, yang tercantum sebagai belanja pembangunan dalam APBD.

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Alat analisis ini digunakan untuk melihat tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern di formulasi menjadi (Widodo, 2002:128).

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Propinsi dan Pinjaman}} \dots\dots\dots(4)$$

Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan ekstern (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

4. Rasio Keserasian

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat semakin kecil. Oleh karena itu, rasio belanja pembangunan yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah. Alat analisis yang digunakan untuk melihat bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal di formulasi (Widodo, 2002:131) menjadi:

$$\text{Rasio belanja rutin terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}} \dots\dots\dots(5)$$

$$\text{Rasio belanja pembangunan terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}} \dots\dots(6)$$

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja rutin maupun pembangunan terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian, sebagai daerah di negara berkembang peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Oleh karena itu, rasio belanja pembangunan yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah.

5. Rasio Pertumbuhan

Mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian. Alat analisis yang digunakan untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan masing-masing komponen pendapatan daerah dan pengeluaran daerah digunakan (Widodo, 2002:135)

$$g = \frac{Z_t - Z_{t-1}}{Z_{t-1}} \dots\dots\dots(7)$$

Keterangan :

- g : tingkat pertumbuhan masing-masing komponen pendapatan daerah dan pengeluaran daerah.
- Z_t : masing-masing komponen pendapatan daerah dan pengeluaran daerah pada tahun t.
- Z_{t-1} : masing-masing komponen pendapatan daerah dan pengeluaran daerah pada tahun sebelumnya.

C. Kemandirian Daerah

Otonomi daerah di Indonesia adalah kewenangan daerah otonom (kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu) untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa dan kemampuan sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat di daerah tersebut sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, di era otonomi daerah ini kemandirian suatu daerah mutlak diperlukan. Hal ini menjadi penting karena suatu daerah dikatakan mandiri apabila tingkat ketergantungannya terhadap Pemerintah Pusat rendah bahkan mungkin tidak lagi tergantung dengan Pemerintah Pusat.

Kaho (2001:60) berpendapat bahwa disamping faktor manusia, peralatan organisasi dan manajemen, faktor keuangan sangat penting dalam setiap kegiatan pemerintahan karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya. Faktor keuangan merupakan faktor yang penting dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Keadaan keuangan daerahlah yang sangat menentukan corak, bentuk, serta kemungkinan-kemungkinan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa adanya biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Dari kondisi keuangan daerah inilah akan dapat dilihat bagaimana kinerja pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri yang mencerminkan tingkat kemandiriannya.

Soeratno dan Yunansman (2002:49) menyebutkan, bahwa derajat otonomi fiskal mengenai kemampuan suatu daerah dalam membiayai program pembangunannya berdasarkan pendapatan asli daerahnya. Kemampuan tersebut dapat terlihat dari rasio PAD dan total pendapatan daerahnya. Keberadaan subsidi pemerintah pusat dalam struktur penerimaan APBD suatu daerah menggambarkan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibidang keuangan. Dari

kenyataan yang ada, hubungan fiskal antara pusat dan daerah ditandai oleh dominannya peranan bantuan dan sumbangan.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah berlaku sejak 1 Januari 2001 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974. Undang-undang tersebut menuntut daerah untuk lebih mandiri dalam mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab menuntut pergeseran peran pemerintah pusat dari posisi sentral dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan ke arah peningkatan kemandirian. Ratnawati (1994:76-77) seperti yang dikutip oleh Soeratno dan Yunasman (2001:48) mengatakan bahwa kesiapan Daerah Tingkat II untuk melaksanakan otonomi daerah dengan baik sangat ditentukan oleh sumber-sumber keuangan daerah yang memadai, terutama yang berasal dari PAD. Soeratno dan Yunasman (2001:48) mengutip dari Radianto (1997:42) menyatakan bahwa otonomi fiskal daerah merupakan salah satu aspek yang sangat penting dari otonomi daerah secara keseluruhan, karena pengertian otonomi fiskal daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerahnya (PAD) untuk mengurangi tingkat ketergantungannya dari pemerintah pusat, sehingga meningkatkan otonomi dan keleluasaan daerah. Langkah penting yang harus dilaksanakan pemerintah daerah

untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah menghitung potensi riil yang dimiliki daerah yang sistematis dan rasional dan mengimplementasikannya. Selain itu juga mengarahkan pembangunan daerah kepada kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan potensi pendapatan asli daerah.

D. Bantuan Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan)

Pasal 6 Ayat 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 menyebutkan bahwa kepada daerah diberikan dana perimbangan yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Bantuan pemerintah pusat atau dana perimbangan yang diberikan merupakan wujud dari bentuk campur tangan pemerintah guna pembangunan daerah - daerah yang mempunyai peran yang tinggi. Dana perimbangan atau bantuan pemerintah pusat ini akan mendukung penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, sehingga pada gilirannya akan mampu (a) memacu pembangunan daerah, (b) meningkatkan pertumbuhan antardaerah yang seimbang, (c) menciptakan pembagian dana yang rasional dan adil khususnya kepada daerah penghasil, (d) meningkatkan pemerataan pembangunan, (e) mengurangi kesenjangan sosial antardaerah, (f) memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah daerah yang bersangkutan, (g) meminimalkan tuntutan daerah, (h) meningkatkan respek daerah terhadap pusat, sehingga hubungan yang harmonis dan serasi antara pusat dan daerah, dan antardaerah akan lebih meningkat serta (i) memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa atau integrasi bangsa.

Tiga komponen utama dalam dana perimbangan atau sumbangan pemerintah pusat adalah sebagai berikut :

1. Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang dialokasikan ke daerah yang bersumber dari APBN, yang besarnya sesuai dengan kontribusi daerah terhadap penerimaan dari sumber daya alam yang dimiliki. Tujuannya, untuk menjaga keadilan atau keseimbangan vertikal atas kontribusi yang telah disumbangkan daerah kepada negara, dalam artian daerah akan memperoleh bagian sesuai dengan besarnya kontribusi terhadap penerimaan negara.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana APBN yang dialokasikan ke daerah dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah guna membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dalam artian terdapat keseimbangan keuangan antardaerah atau keseimbangan horisontal sehingga tidak ada lagi disparitas yang cukup tinggi terhadap keuangan antardaerah. Pemberian DAU ini menggantikan mekanisme pemberian subsidi ke daerah yang ada selama ini melalui subsidi daerah otonom (SDO) serta dana inpres. Perbedaan yang paling mendasar antara DAU dengan pola SDO dan inpres adalah sifatnya yang *block grant* yang berarti daerah mempunyai kewenangan penuh dalam penggunaan DAU.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana dari APBN yang dialokasikan ke daerah untuk membantu kebutuhan khusus, yaitu (a) kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan formula dana alokasi umum, (b) kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional dan (c) kebutuhan untuk

kegiatan reboisasi dan penghijauan. Kegiatan yang tidak dapat dibiayai oleh DAK meliputi biaya administrasi, biaya penyiapan proyek fisik, biaya penelitian, biaya perjalanan dinas dan lain sebagainya.

Dengan lancarnya pelaksanaan pembangunan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah, sehingga secara nyata produk domestik regional bruto (PDRB) juga akan mengalami kenaikan. Laju derap pembangunan di daerah yang semakin luas jangkauan pelaksanaan dan perencanaannya, maka akan semakin meningkat pula jumlah proyek dan dana yang dibutuhkan. Namun demikian harus disadari bahwa pembangunan daerah yang mempunyai implikasi pertumbuhan ekonomi selain membutuhkan dana besar juga memerlukan faktor lain seperti tersedianya tenaga ahli dalam berbagai bidang, terdapat sistem pemerintahan yang baik, tingkat teknologi yang memungkinkan penggunaannya, sikap terhadap masyarakat, tersedianya sumber alam dan sebagainya.

E. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pengertian Produk domestik regional bruto (PDRB) dapat didefinisikan menurut tiga sudut pandang yang saling berbeda namun mempunyai satu pengertian yang sama.

- a. Menurut Pendekatan Pendapatan adalah merupakan jumlah balas dan jasa yang diterima oleh berbagai faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi dalam suatu regional atau wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Balas jasa yang dimaksud berupa gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan sebelum dipotong pajak penghasilan, dan pajak lainnya. Dalam pengertian PDRB

kecuali balas jasa faktor produksi diatas termasuk pula komponen penyusutan dan pajak tidak langsung netto. Seluruh komponen pendapatan ini secara sektoral disebut sebagai nilai tambah bruto.

- b. Menurut Pendekatan Produksi adalah jumlah nilai tambah bruto dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi didalam suatu regional atau wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).
- c. Menurut Pendekatan Pengeluaran adalah merupakan jumlah pengeluaran oleh rumah tangga, konsumsi pemerintah, lembaga swasta tidak mencari untung dan pengeluaran untuk pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stock dari eksport netto di suatu wilayah atau daerah tertentu dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Eksport yang dimaksud adalah jumlah nilai ekspor dikurangi dengan jumlah nilai impor.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif yaitu metode yang bermanfaat dalam membantu memecahkan permasalahan yang aktual dengan berusaha menyimpulkan, menyajikan, menganalisis dan membandingkan data yang ada.

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup Penelitian ini meliputi Pemerintah Daerah Kota Surakarta, Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri.

B. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersifat kuantitatif. Data tersebut berupa data keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kota Surakarta, Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri. Sumber data tersebut diperoleh langsung dari beberapa instansi yaitu :

1. Kantor Bagian Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Surakarta, BPKD Kabupaten Klaten, dan BPKD Kabupaten Wonogiri.
 - a. Anggaran Pendapatan Daerah Kota Surakarta, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Wonogiri.
 - b. Rekapitulasi belanja rutin dan belanja pembangunan APBD kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri dan Kota Surakarta.

2. Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Wonogiri.
 - a. Anggaran dan realisasi pendapatan daerah
 - b. Realisasi belanja rutin dan pembangunan daerah.
3. Kantor Badan Pusat Statistik (BPS).
 - a. Besarnya produk domestik regional bruto.
 - b. Jumlah penduduk.

C. Analisis Data

Analisis rasio keuangan terhadap APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat dinilai kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut dengan pemerintah daerah lainnya. Rasio-rasio yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Rasio Komponen Pendapatan Daerah

Soeratno dan Yunasman (2002:49) berpendapat bahwa alat analisis yang digunakan untuk melihat proporsi masing-masing komponen pendapatan daerah di formulasi menjadi :

$$RKPD = \frac{\text{PAD atau BHPBP atau SUMBANT}}{\text{TPD}} \times 100 \% \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan :

RKPD : rasio komponen pendapatan daerah.

PAD : pendapatan asli daerah.

BHPBP : bagi hasil pajak dan bukan pajak.

SUMBANT : sumbangan dan bantuan.

2. Rasio Komponen Belanja Rutin Daerah dan Rasio Komponen Belanja Pembangunan Daerah.

Soeratno dan Yunasman (2002:49) menyatakan bahwa alat analisis yang digunakan untuk melihat proporsi pendapatan asli daerah dengan belanja rutin dan pembangunan di formulasikan menjadi :

$$RKBRD = \frac{PAD}{BR} \times 100 \% \dots\dots\dots(2)$$

$$RKBPD = \frac{PAD}{BP} \times 100 \% \dots\dots\dots(3)$$

Keterangan :

RKBRD : rasio kemampuan belanja rutin daerah.

RKBPD : rasio kemampuan belanja pembangunan daerah.

BR : belanja rutin.

BP : belanja pembangunan.

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Widodo (2002:128) menyatakan bahwa alat analisis ini digunakan untuk melihat tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern di formulasi menjadi

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Propinsi dan Pinjaman}} \dots\dots\dots(4)$$

4. Rasio Keserasian

Alat analisis yang digunakan untuk melihat bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal di formulasikan oleh Widodo (2002:131) menjadi:

$$\text{Rasio belanja rutin terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}} \dots\dots\dots(5)$$

$$\text{Rasio belanja pembangunan terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}} \dots\dots\dots(6)$$

5. Rasio Pertumbuhan

Widodo (2002:135) menyatakan bahwa alat analisis yang digunakan untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan masing-masing komponen pendapatan daerah dan pengeluaran daerah adalah :

$$g = \frac{Z_t - Z_{t-1}}{Z_{t-1}} \dots\dots\dots(7)$$

Keterangan :

g : tingkat pertumbuhan masing-masing komponen pendapatan daerah dan pengeluaran daerah.

Z_t : masing-masing komponen pendapatan daerah dan pengeluaran daerah pada tahun t .

Z_{t-1} : masing-masing komponen pendapatan daerah dan pengeluaran daerah pada tahun sebelumnya.

D. Pembatasan Variabel

Variabel yang dianalisis meliputi variabel – variabel yang dipilih dengan batasan sebagai berikut :

1. Pendapatan asli daerah (PAD) yaitu pendapatan yang bersumber dari: pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah, penerimaan lain-lain.
2. Bantuan pemerintah pusat atau propinsi dan pinjaman yaitu pendapatan yang bersumber dari: bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, subsidi daerah otonom, DAU, DAK, bantuan pembangunan, penerimaan lainnya, dan pinjaman.
3. Bagi hasil pajak dan bukan pajak (BHPBP) adalah penerimaan bagi hasil dari pemerintah tingkat propinsi dan dari pemerintah pusat.
4. Penerimaan sumbangan dan bantuan (SUMBANT) adalah penerimaan dari pemerintah pusat untuk pembiayaan belanja pegawai, belanja rutin non pegawai dan belanja pembangunan. Dengan kata lain, pendapatan yang bersumber dari: subsidi daerah otonom, DAU, DAK, bantuan pembangunan dan penerimaan lainnya.
5. Total pendapatan daerah (TPD) adalah jumlah penerimaan daerah yang berasal dari sisa lebih anggaran tahun lalu, pendapatan asli daerah, penerimaan BHPBP dan penerimaan yang berasal dari sumbangan atau bantuan (bagian pendapatan

yang berasal dari pemberian pemerintah dan atau instansi yang lebih tinggi atau dikenal dengan sebutan dana perimbangan) serta pinjaman.

6. Belanja rutin adalah pengeluaran yang berasal dari: belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja lain-lain, pengeluaran yang tidak disangka dan sebagainya, yang tercantum sebagai belanja rutin dalam APBD.
7. Belanja pembangunan adalah pengeluaran yang berasal dari: sektor industri, sektor pertanian dan kehutanan, sektor sumber daya air dan irigasi, sektor tenaga kerja, sektor transportasi dan sebagainya, yang tercantum sebagai belanja pembangunan dalam APBD.

BAB IV ANALISA DATA

A. Gambaran Umum

1. Keadaan Geografis

Kota Surakarta terdiri dari 4 kecamatan dengan luas wilayah 4.400 Ha. Kota Surakarta terletak antara $110^{\circ} 45' 15''$ - $110^{\circ} 45' 35''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 36' 00''$ - $7^{\circ} 56' 00''$ Lintang Selatan. Wilayah Kota Surakarta mempunyai batas-batas daerah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Karanganyar.
2. Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo.
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Sukoharjo.
4. Sebelah Barat : Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar.

Daerah Kabupaten Klaten terbentang diantara Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kota Surakarta yang dilewati jalan raya Jogja – Solo mempunyai peranan sangat penting dalam memperlancar segala kegiatan ekonomi. Wilayah Kabupaten Klaten terdiri 26 kecamatan dan terletak antara $110^{\circ} 30'$ - $110^{\circ} 45'$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 30'$ - $7^{\circ} 45'$ Lintang Selatan. Adapun batas wilayah Kabupaten Klaten sebagai berikut:

- | | |
|-----------------|---|
| Sebelah Utara | : Kabupaten Boyolali. |
| Sebelah Timur | : Kabupaten Sukoharjo. |
| Sebelah Selatan | : Kabupaten Gunung Kidul (DI Yogyakarta). |
| Sebelah Barat | : Kabupaten Sleman (DI Yogyakarta). |

Daerah Kabupaten Klaten bila dilihat dari keadaan alamnya yang sebagian besar adalah dataran rendah dan didukung dengan banyaknya sumber air maka daerah Kabupaten Klaten merupakan daerah pertanian yang potensial disamping penghasil kapur, batu kali dan pasir yang berasal dari Gunung Merapi.

Kabupaten Wonogiri terdiri 24 kecamatan dan terletak di ujung timur tenggara Propinsi Jawa Tengah, pada posisi $110^{\circ} 41'$ - $111^{\circ} 18'$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 32'$ - $8^{\circ} 15'$ Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Wonogiri mempunyai batas-batas daerah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar.
2. Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Ponorogo (Jatim).
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Pacitan.
4. Sebelah Barat : Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Wilayah Kabupaten Wonogiri secara umum merupakan perbukitan dengan batuan kapur yang termasuk dalam jajaran Pegunungan Seribu dengan sumber air yang merupakan mata air hulu sungai Bengawan Solo.

2. Keadaan Penduduk

Keadaan penduduk masing-masing kabupaten atau kota meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, dan kepadatan penduduknya pada tahun 2001 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.1
Kepadatan Penduduk
Tahun 2001

No	Kota / Kabupaten	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk
1.	Surakarta	489.900	44,03	11.126,50
2.	Klaten	1.109.486	655,56	1.692,42
3.	Wonogiri	967.178	1.822,37	530,73

Sumber : BPS Sukoharjo (Jawa Tengah dalam Angka 2001)

Kepadatan penduduk merupakan perbandingan antara jumlah penduduk suatu daerah dengan luas wilayahnya yang dinyatakan dalam jiwa/km². Tabel IV.1 menunjukkan Kota Surakarta dengan jumlah penduduk sebesar 489.900 jiwa dan luas wilayah 44,03 Km² mempunyai kepadatan penduduk sebesar 11.126,50 (terbesar). Kabupaten Klaten dengan jumlah penduduk sebesar 1.109.486 jiwa dan luas wilayah sebesar 655,56 Km² mempunyai kepadatan penduduk sebesar 1.692,42. Sedangkan Kabupaten Wonogiri mempunyai luas wilayah sebesar 1.822,37 Km² dengan penduduk berjumlah 967.178 jiwa mempunyai kepadatan penduduk sebesar 530,73 (terkecil).

3. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi masing-masing Kota atau Kabupaten dijelaskan dengan besarnya produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita. Produk domestik regional bruto (PDRB) merupakan dasar pengukuran atau nilai tambah yang dihasilkan dari adanya kegiatan ekonomi daerah.

Tabel IV.2

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Tahun 1997 – 2001
(dalam ribuan)

No	Kota/Kabupaten	1997	1998	1999	2000	2001	Rata-rata
1.	Surakarta	2.662	2.281	2.296	2.375	2.454	2.414
2.	Klaten	1.056	932	933	956	989	973
3.	Wonogiri	718	680	689	707	722	703

Sumber : BPS Sukoharjo (Pendapatan Regional Jateng Tahun 2001)

Tabel IV.2 menunjukkan bahwa Kota Surakarta selama tahun 1997 – 2001 mempunyai rata-rata pendapatan produk domestik regional bruto per kapita sebesar Rp.2.414.000,00 (terbesar). Kabupaten Klaten menduduki peringkat kedua setelah Kota Surakarta yaitu sebesar Rp.973.000,00. Sedangkan Kabupaten Wonogiri mempunyai rata-rata pendapatan produk domestik regional bruto per kapita selama tahun 1997 – 2001 sebesar Rp.703.000,00 (terkecil).

4. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Komponen APBD yang dibahas dalam penelitian ini meliputi pendapatan asli daerah (PAD); bantuan pemerintah pusat / propinsi dan pinjaman; bagi hasil pajak dan bukan pajak (BHPBP); sumbangan dan bantuan; total pendapatan daerah belanja rutin dan

belanja pembangunan. Realisasi komponen APBD tahun anggaran 1998/1999 – 2002 pada masing-masing kota atau kabupaten adalah sebagai berikut:

Tabel IV.3

Perkembangan Komponen APBD Kota Surakarta

Tahun Anggaran 1998/1999 – 2002 (dalam ribuan)						
Keterangan	1998/1999	1999/2000	2000	2001	2002	Rata-rata
	17.499.541	19.887.769	21.919.678	35.852.034	45.112.371	28.054.279
<i>PAD</i>						
B3P	46.160.466	73.099.876	80.705.056	170.651.458	215.549.641	117.233.299
BHPBP	1.687.827	9.137.173	11.209.014	17.213.999	17.695.214	11.388.645
SUMBANT	37.275.163	50.628.539	69.496.042	153.437.459	197.854.427	101.738.326
TPD	66.758.728	100.973.580	111.753.280	216.068.382	266.264.397	152.363.674
BR	48.910.144	63.852.788	66.257.512	189.826.091	209.264.397	115.622.186
BP	9.425.820	27.522.214	37.954.755	19.511.285	53.360.284	29.554.871

Sumber : BPKD Surakarta.

Notasi:

PAD = Pendapatan asli daerah.

B3P = Bantuan pemerintah pusat atau propinsi dan pinjaman.

BHPBP = Bagi hasil pajak dan bukan pajak.

SUMBANT = Sumbangan.

TPD = Total Pendapatan Daerah.

BR = Belanja rutin.

BP = Belanja pembangunan.

Tabel IV.3 menunjukkan bahwa Kota Surakarta selama tahun anggaran 1998/1999 – 2002 mempunyai total pendapatan daerah rata-rata sebesar Rp. 152.363.674.000,00. Komponen APBD yang mempunyai kontribusi terbesar dalam anggaran pendapatan belanja daerahnya adalah komponen bantuan pemerintah pusat atau propinsi dan pinjaman sebesar Rp.117.233.299.000,00 Sedangkan komponen APBD yang memberikan kontribusi paling sedikit adalah komponen PAD sebesar Rp.28.054.279.000,00.

Tabel IV.4

Perkembangan Komponen APBD Kabupaten Klaten

Tahun Anggaran 1998/1999 – 2002
(dalam ribuan)

Keterangan	1998/1999	1999/2000	2000	2001	2002	Rata-rata
	7.469.951	7.901.972	6.598.582	13.832.059	17.519.439	10.664.401
D						
B3P	96.204.060	129.634.397	116.331.787	312.397.228	358.968.524	202.707.199
BHPBP	5.936.035	6.789.485	7.337.749	10.494.720	12.714.084	8.654.415
SUMBANT	90.268.025	122.844.912	108.994.038	301.902.508	346.254.439	194.025.784
TPD	105.718.384	140.969.155	126.579.029	331.562.595	387.763.520	218.518.537
BR	87.116.281	115.923.043	103.912.429	292.744.054	317.462.747	183.431.711
BP	15.169.316	21.397.452	17.333.292	27.542.983	46.809.359	25.650.481

Sumber : DIPENDA Klaten

Tabel IV.4 menunjukkan bahwa Kabupaten Klaten selama lima tahun periode yaitu tahun anggaran 1998/1999 – 2002 mempunyai rata-rata total pendapatan

daerahnya sebesar Rp.218.518.537.000,00. Komponen APBD yang memberikan kontribusi terbesar adalah komponen bantuan pemerintah pusat atau propinsi dan pinjaman sebesar Rp.202.707.199.000,00. Sedangkan komponen APBD yang memberikan kontribusi terkecil adalah komponen bagi hasil pajak dan bukan pajak (BHPBP) sebesar Rp.8.654.415.000,00.

Tabel IV.5
Perkembangan Komponen APBD Kabupaten Wonogiri
Tahun Anggaran 1998/1999 – 2002
(dalam ribuan)

Keterangan	1998/1999	1999/2000	2000	2001	2002	rata-rata
PAD	9.889.354	10.837.763	10.366.132	14.224.167	23.108.192	13.685.122
B3P	81.177.096	106.993.553	98.811.021	257.871.849	278.551.247	164.680.953
BHPBP	5.511.409	6.422.611	7.116.756	12.174.802	11.750.810	8.595.277
SUMBANT	75.665.687	100.570.942	91.694.265	245.697.046	266.800.437	156.085.676
TPD	94.029.393	121.642.082	113.779.387	280.772.979	325.063.865	187.057.541
BR	70.385.668	93.804.225	85.163.294	220.841.781	238.446.989	141.728.391
BP	19.832.959	23.235.623	19.939.131	36.526.754	61.954.021	32.297.697

Sumber : BPKD Wonogiri

Tabel IV.5 menunjukkan bahwa Kabupaten Wonogiri selama tahun anggaran 1998/1999 – 2002 mempunyai rata-rata total pendapatan daerah sebesar Rp.

187.057.541.000,00. Komponen APBD yang memberikan kontribusi terbesar adalah komponen bantuan pemerintah pusat atau propinsi dan pinjaman sebesar Rp.164.680.953.000,00. Sedangkan komponen APBD yang memberikan kontribusi terkecil adalah komponen bagi hasil pajak dan bukan pajak (BHPBP) sebesar Rp.8.595.277.000,00.

B. Perbandingan Tingkat Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah

Kota Surakarta, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Wonogiri.

1. Rasio Komponen Pendapatan Daerah (RKPD)

Alat analisis yang berupa rasio ini digunakan untuk melihat proporsi masing-masing komponen pendapatan daerah yang diformulasikan oleh Soeratno dan Yunasman (2002:49) menjadi :

$$\text{RKPD} = \frac{\text{PAD atau BHPBP atau SUMBANT}}{\text{TPD}} \times 100 \% \dots\dots\dots(1)$$

1.1 Di Tinjau dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dibandingkan dengan Total Pendapatan Daerah (TPD).

Pendapatan asli daerah (PAD) yaitu pendapatan yang bersumber dari: pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah, penerimaan lain-lain. Adapun komponen total pendapatan daerah (TPD) adalah jumlah penerimaan daerah yang

berasal dari sisa lebih anggaran tahun lalu, pendapatan asli daerah, penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak (BHPBP) dan penerimaan yang berasal dari sumbangan atau bantuan (bagian pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah dan atau instansi yang lebih tinggi atau dikenal dengan sebutan dana perimbangan) serta pinjaman.

Perbandingan besarnya rasio ini antara Kota Surakarta dengan Kabupaten Klaten dan Wonogiri dapat dilihat pada tabel IV.6.

Tabel IV.6
Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah dengan Total Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 1998/1999 – 2002

Keterangan	1998/1999	1999/2000	2000	2001	2002	rata-rata
	26,21 %	19,70 %	19,61 %	16,59 %	16,9 %	19,80 %
<i>Surakarta</i>						
Klaten	7,07 %	5,60 %	5,21 %	4,17 %	4,52 %	5,31 %
Wonogiri	10,52 %	8,91 %	9,11 %	5,07 %	7,12 %	8,15 %

Sumber : BPKD Kota Surakarta, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Wonogiri.

Tabel IV.6 di atas menunjukkan bahwa selama tahun anggaran 1998/1999 – 2002 Kota Surakarta mempunyai proporsi PAD sebesar 19,80 persen dari rata-rata total pendapatan daerahnya. Nilai tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan Kabupaten Klaten dan Wonogiri. Kabupaten Klaten mempunyai proporsi PAD

sebesar 5,31 persen terhadap rata-rata total pendapatan daerahnya, sedangkan proporsi PAD Kabupaten Wonogiri adalah sebesar 8,15 persen dari rata-rata total pendapatan daerahnya.

1.2 Di Tinjau dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) Dibandingkan dengan Total Pendapatan Daerah (TPD).

Bagi hasil pajak dan bukan pajak (BHPBP) adalah penerimaan bagi hasil dari pemerintah tingkat propinsi dan dari pemerintah pusat. Penghitungan rasio ini ditujukan untuk melihat besarnya proporsi bagi hasil pajak dan bukan pajak terhadap total pendapatan daerahnya. Adapun perbandingan besarnya rasio tersebut dapat dilihat pada tabel IV.7.

Tabel IV.7

**Proporsi Komponen Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
dengan Komponen Total Pendapatan Daerah**

Tahun Anggaran 1998/1999 – 2002

Keterangan	1998/1999	1999/2000	2000	2001	2002	rata-rata
	2,53 %	9,05 %	10,03 %	7,97 %	6,63 %	7,24 %
Surakarta						
Klaten	5,61 %	4,82 %	5,80 %	3,16 %	3,28 %	4,53 %
Wonogiri	5,86 %	5,28 %	6,25 %	4,34 %	3,61 %	5,07 %

Sumber : BPKD Kota Surakarta, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Wonogiri.

Berdasarkan hasil penghitungan (tabel IV.7) terlihat bahwa Kota Surakarta mempunyai proporsi komponen bagi hasil pajak dan bukan pajak lebih besar jika dibandingkan dengan Kabupaten Klaten dan Wonogiri. Proporsi bagi hasil pajak dan bukan pajak Kota Surakarta sebesar 7,24 persen. Sedangkan Kabupaten Klaten dan Wonogiri masing-masing sebesar 4,53 persen dan 5,07 persen.

1.3 Di Tinjau dari Sumbangan dan Bantuan (SUMBANT) Dibandingkan dengan Total Pendapatan Daerah (TPD).

Penghitungan rasio ini digunakan untuk melihat besarnya proporsi sumbangan dari total pendapatan daerahnya. Komponen penerimaan sumbangan dan bantuan (SUMBANT) adalah penerimaan dari pemerintah pusat untuk pembiayaan belanja pegawai, belanja rutin non pegawai dan belanja pembangunan. Dengan kata lain, pendapatan yang bersumber dari: subsidi daerah otonom, DAU, DAK, bantuan pembangunan dan penerimaan lainnya. Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel IV.8.

Tabel IV.8

Proporsi Komponen Sumbangan dan Bantuan dengan Komponen Total Pendapatan Daerah

Tahun Anggaran 1998/1999 – 2002

Keterangan	1998/1999	1999/2000	2000	2001	2002	rata-rata
	55,84 %	50,14 %	62,19 %	71,01 %	74,12%	62,66 %

Surakarta

Klaten	85,38 %	87,14 %	86,11%	91,05 %	89,29%	87,79 %
Wonogiri	80,47 %	82,68 %	80,59 %	87,51 %	82,08%	82,66 %

Sumber : BPKD Kota Surakarta, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Wonogiri.

Berdasarkan hasil pada tabel IV.8 menunjukkan bahwa Kabupaten Klaten dan Wonogiri dalam membiayai belanja pegawai, belanja rutin non pegawai dan belanja pembangunan masih sangat tergantung dari penerimaan pemerintah pusat. Hal tersebut terlihat dari tingginya rasio yang dihasilkan oleh Kabupaten Klaten dan Wonogiri yaitu sebesar 87,79 persen dan 82,66 persen. Sedangkan Proporsi komponen sumbangan dan bantuan Kota Surakarta sebesar 62,66 persen.

2. Rasio Komponen Belanja Rutin Daerah (RKBRD)

Alat analisis yang berupa rasio ini digunakan untuk melihat proporsi pendapatan asli daerah dengan belanja rutin dan pembangunan di formulasi (Soeratno dan Yunasman, 2002:49) menjadi.

$$\text{RKBRD} = \frac{\text{PAD}}{\text{BR}} \times 100 \% \dots\dots\dots(2)$$

Belanja rutin adalah pengeluaran yang berasal dari: belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja lain-lain, pengeluaran yang tidak disangka dan sebagainya, yang tercantum sebagai belanja rutin dalam APBD.

Perbandingan besarnya rasio kemampuan belanja rutin daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.9**Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah dengan Komponen Belanja Rutin****Tahun Anggaran 1998/1999 – 2002**

Keterangan	1998/1999	1999/2000	2000	2001	2002	rata-rata
	35,78 %	31,15 %	33,08 %	18,89 %	21,56%	28,09 %
Surakarta						
Klaten	8,57 %	6,82 %	6,35 %	4,72 %	5,52 %	6,40 %
Wonogiri	14,05 %	11,55 %	12,17 %	6,44 %	9,69 %	10,78 %

Sumber : BPKD Kota Surakarta, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Wonogiri.

Tabel di atas menunjukkan bahwa Kota Surakarta dalam membiayai sendiri pengeluaran-pengeluaran pemerintah daerah yang ditujukan untuk kegiatan sehari-harinya (belanja rutin) selama tahun anggaran 1998/1999 – 2002 sebesar 28,09 persen dari rata-rata pendapatan asli daerahnya. Sedangkan Kabupaten Klaten dan Wonogiri sebesar 6,40 persen dan 10,78 persen.

3. Rasio Komponen Belanja Pembangunan Daerah (RKBPD)

Belanja pembangunan adalah pengeluaran yang berasal dari: sektor industri, sektor pertanian dan kehutanan, sektor sumber daya air dan irigasi, sektor tenaga kerja, sektor transportasi dan sebagainya, yang tercantum sebagai belanja pembangunan dalam APBD. Alat analisis yang berupa rasio ini digunakan untuk

melihat proporsi pendapatan asli daerah dengan belanja rutin dan pembangunan di formulasi (Soeratno dan Yunasman, 2002:49) menjadi:

$$\text{RKBP} = \frac{\text{PAD}}{\text{BP}} \times 100 \% \dots\dots\dots(3)$$

Perbandingan besarnya rasio kemampuan belanja pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.10

**Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah
dengan Komponen Belanja Pembangunan**

Tahun Anggaran 1998/1999 – 2002

Keterangan	1998/1999	1999/2000	2000	2001	2002	rata-rata
	185,65 %	72,26 %	57,75 %	183,75 %	84,54 %	116,79 %
<i>Surakarta</i>						
Klaten	49,24 %	36,93 %	38,07 %	50,22 %	37,43 %	42,38 %
Wonogiri	49,86 %	46,64 %	51,99 %	38,94 %	37,30 %	44,94 %

Sumber : BPKD Kota Surakarta, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Wonogiri.

Tabel di atas menunjukkan bahwa komponen pendapatan asli daerah yang digunakan untuk belanja pembangunan di Kota Surakarta sebesar 116,79 persen, Kabupaten Klaten sebesar 42,38 persen dan Kabupaten Wonogiri sebesar 44,94 persen.

4. Rasio Kemandirian

Alat analisis yang berupa rasio ini digunakan untuk melihat tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern di formulasi menjadi (Widodo, 2002:128).

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Propinsi dan Pinjaman}} \dots\dots\dots(4)$$

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Perbandingan besarnya rasio kemandirian daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.11

Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah dengan Komponen Bantuan Pemerintah Pusat / Propinsi dan Pinjaman (Rasio Kemandirian)

Tahun Anggaran 1998 – 2002

Keterangan	1998/1999	1999/2000	2000	2001	2002	rata-rata
	37,91 %	27,21 %	27,16 %	21,01 %	20,93 %	26,84 %
<i>Surakarta</i>						
Klaten	7,76 %	6,09 %	5,67 %	4,43 %	4,88 %	5,76 %
Wonogiri	12,18 %	10,13 %	10,49 %	5,52 %	8,30 %	9,32 %

Sumber : BPKD Kota Surakarta, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Wonogiri.

Tabel di atas menunjukkan bahwa Kota Surakarta mempunyai nilai rasio tertinggi yaitu sebesar 26,84 persen. Sedangkan Kabupaten Klaten dan Wonogiri

sebesar 5,76 persen dan 9,32 persen. Hal ini berarti tingkat ketergantungan Kota Surakarta terhadap bantuan ekstern rendah, jika dibandingkan dengan Kabupaten Klaten dan Wonogiri.

5. Rasio Keserasian

Alat analisis yang berupa rasio ini digunakan untuk melihat bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal di formulasi (Widodo, 2002:131) menjadi:

$$\text{Rasio belanja rutin terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}} \dots\dots\dots(5)$$

$$\text{Rasio belanja pembangunan terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}} \dots\dots(6)$$

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya ratio belanja rutin maupun belanja pembangunan terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian, sebagai daerah di negara berkembang peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Oleh karena itu, rasio belanja pembangunan yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah. Perbandingan besarnya rasio keserasian pada masing-masing kota atau kabupaten dapat dilihat pada Tabel IV.12.

Tabel IV.12

Rasio keserasian Kota Surakarta

Tahun Anggaran 1998/1999 – 2002

Keterangan	1998/1999	1999/2000	2000	2001	2002	rata-rata
Rasio Keserasian:						
Tot. BR	73,26 %	63,24 %	59,30 %	87,85 %	78,39 %	72,41 %
APBD						
Rasio Keserasian:						
Tot. BP	14,12 %	27,26 %	33,96 %	9,03 %	20,04 %	20,88 %
APBD						

Sumber : BPKD Kota Surakarta, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Wonogiri.

Dari perhitungan rasio di atas terlihat bahwa sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah Kota Surakarta masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja rutin sehingga rasio belanja pembangunan terhadap APBD masih relatif kecil.

Tabel IV.13

Rasio keserasian Kabupaten Klaten

Tahun Anggaran 1998/1999 – 2002

Keterangan	1998/1999	1999/2000	2000	2001	2002	rata-rata
------------	-----------	-----------	------	------	------	-----------

Rasio Keserasian:						
Tot. BR	82,40 %	82,23 %	82,09 %	88,29 %	81,87 %	83,38 %
APBD						
Rasio Keserasian:						
Tot. BP	14,35 %	15,18 %	13,69 %	8,31 %	12,07 %	12,72 %
APBD						

Sumber : BPKD Kota Surakarta, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Wonogiri.

Tabel IV.3 menunjukkan bahwa sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja rutin sehingga rasio belanja pembangunan terhadap APBD masih relatif kecil.

Tabel IV.14

Rasio keserasian Kabupaten Wonogiri

Tahun Anggaran 1998/1999 – 2002

Keterangan	1998/1999	1999/2000	2000	2001	2002	rata-rata
Rasio Keserasian:						
Tot. BR	74,85 %	77,11 %	74,85 %	78,65 %	73,35 %	75,76 %
APBD						
Rasio Keserasian:						
Tot. BP	21,09 %	19,10 %	17,52 %	13,01 %	19,06 %	17,96 %
APBD						

Sumber : BPKD Kota Surakarta, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Wonogiri.

Dari perhitungan rasio di atas terlihat bahwa sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja rutin sehingga rasio belanja pembangunan terhadap APBD masih relatif kecil.

6. Rasio Pertumbuhan

Alat analisis yang berupa rasio ini digunakan untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan masing-masing komponen pendapatan daerah dan pengeluaran daerah (Widodo, 2002:135)

$$g = \frac{Z_t - Z_{t-1}}{Z_{t-1}} \dots\dots\dots(7)$$

Rasio pertumbuhan (growth ratio) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian. Adapun besarnya pertumbuhan masing-masing komponen anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) adalah sebagai berikut :

Tabel IV.15

**Rasio Pertumbuhan Komponen APBD Kota Surakarta
Tahun Anggaran 1998/1999 – 2002
(dalam ribuan)**

N0	Keterangan	1998/1999	1999/2000	2000	2001	2002
1.	PAD	17.499.541	19.887.769	21.919.678	35.852.034	45.112.371
2.	Pertumbuhan	-	13,65 %	10,22 %	63,56 %	25,83 %
3.	Bantuan Pempu Dan Pinjaman	46.160.466	73.099.876	80.705.056	170.651.458	215.549.641
4.	Pertumbuhan	-	58,36 %	10,40 %	111,45 %	26,31 %
5.	BHPBP	1.687.827	9.137.173	11.209.014	17.213.999	17.695.214
6.	Pertumbuhan	-	441,36 %	22,67 %	53,57 %	2,79 %
7.	SUMBANT	37.275.163	50.628.539	69.496.042	153.437.459	197.854.427
8.	Pertumbuhan	-	35,82 %	37,27 %	120,78 %	28,95 %
9.	TPD	66.758.728	100.973.580	111.753.280	216.068.382	266.264.397
10.	Pertumbuhan	-	51,25 %	10,67 %	93,34 %	23,23 %
11.	Belanja Rutin	48.910.144	63.852.788	66.257.512	189.826.091	209.264.397
12.	Pertumbuhan	-	30,55 %	3,76 %	186,50 %	10,24 %
13.	Belanja Pembangunan	9.425.820	27.522.214	37.954.755	19.511.285	53.360.284
14.	Pertumbuhan	-	191,99 %	37,91 %	(48,59 %)	173,48 %

Sumber : BPKD Kota Surakarta, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Wonogiri.

Dari perhitungan tabel IV.15 diatas dapat dijelaskan bahwa masing-masing komponen menunjukkan pertumbuhan yang positif kecuali komponen belanja pembangunan pada tahun anggaran 2000-2001 mengalami penurunan dengan angka penurunan sebesar 48,59 persen.

Tabel IV.16

Rasio Pertumbuhan Komponen APBD Kabupaten Klaten
Tahun Anggaran 1998/1999 – 2002
(dalam ribuan)

No	Keterangan	1998/1999	1999/2000	2000	2001	2002
1.	PAD	7.469.951	7.901.972	6.598.582	13.832.059	17.519.439
2.	Pertumbuhan	-	5,78 %	(16,49 %)	109,62 %	26,66 %
3.	Bantuan Pempu Dan Pinjaman	96.204.060	129.634.397	116.331.787	312.397.228	358.968.524
4.	Pertumbuhan	-	34,75 %	(10,26 %)	168,54 %	14,91 %
5.	BHPBP	5.936.035	6.789.485	7.337.749	10.494.720	12.714.084
6.	Pertumbuhan	-	14,38 %	8,07 %	43,02 %	21,15 %
7.	SUMBANT	90.268.025	122.844.912	108.994.038	301.902.508	346.254.439
8.	Pertumbuhan	-	36,09 %	(11,27 %)	176,99 %	14,69 %
9.	TPD	105.718.384	140.969.155	126.579.029	331.562.595	387.763.520
10.	Pertumbuhan	-	33,34 %	(10,21%)	161,94 %	16,95 %
11.	Belanja Rutin	87.116.281	115.923.043	103.912.429	292.744.054	317.462.747
12.	Pertumbuhan	-	33,07 %	(10,36 %)	181,72 %	8,44 %
13.	Belanja Pembangunan	15.169.316	21.397.452	17.333.292	27.542.983	46.809.359
14.	Pertumbuhan	-	41,06 %	(18,99 %)	58,90 %	69,95 %

Sumber : BPKD Kota Surakarta, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Wonogiri.

Tabel IV.16 menunjukkan bahwa pertumbuhan komponen APBD Kabupaten Klaten pada tahun anggaran 1998/1999 – 2002 mempunyai kecenderungan positif, walaupun pada tahun anggaran 1999/2000 – 2000 sebagian besar komponen mengalami pertumbuhan yang negatif

Tabel IV.17

Rasio Pertumbuhan Komponen APBD Kabupaten Wonogiri**Tahun Anggaran 1998/1999-2002****(dalam ribuan)**

N0	Keterangan	1998/1999	1999/2000	2000	2001	2002
1.	PAD	9.889.354	10.837.763	10.366.132	14.224.167	23.108.192
2.	Pertumbuhan	-	9,59 %	(4,35 %)	37,22 %	62,46 %
3.	Bantuan Pempu Dan Pinjaman	81.177.096	106.993.553	98.811.021	257.871.849	278.551.247
4.	Pertumbuhan	-	31,80 %	(7,65 %)	160,97 %	8,02 %
5.	BHPBP	5.511.409	6.422.611	7.116.756	12.174.802	11.750.810
6.	Pertumbuhan	-	16,53 %	10,81 %	71,07 %	(3,48 %)
7.	SUMBANT	75.665.687	100.570.942	91.694.265	245.697.046	266.800.437
8.	Pertumbuhan	-	32,91 %	(8,83 %)	167,95 %	8,59 %
9.	TPD	94.029.393	121.642.082	113.779.387	280.772.979	325.063.865
10.	Pertumbuhan	-	29,37 %	(6,46 %)	146,77 %	15,77 %
11.	Belanja Rutin	70.385.668	93.804.225	85.163.294	220.841.781	238.446.989
12.	Pertumbuhan	-	33,27 %	(9,21 %)	159,31 %	7,97 %
13.	Belanja Pembangunan	19.832.959	23.235.623	19.939.131	36.526.754	61.954.021
14.	Pertumbuhan	-	17,16 %	(14,19 %)	83,19 %	69,61 %

Sumber : BPKD Kota Surakarta, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Wonogiri.

Tabel IV.17 menunjukkan bahwa pertumbuhan komponen APBD Kabupaten Wonogiri pada tahun anggaran 1998/1999 – 2002 mempunyai kecenderungan positif,

walaupun pada tahun anggaran 1999/2000 – 2000 sebagian besar komponen mengalami pertumbuhan yang negatif.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dari penjelasan analisis diatas dapat penulis berikan beberapa kesimpulan untuk memudahkan dalam mencapai tujuan penulisan skripsi ini. Pada bab terakhir ini penulis mencoba menarik kesimpulan dan memberikan sedikit saran berdasarkan analisis diatas, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut serta masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian pada Kota Surakarta : rata-rata proporsi atau komposisi masing-masing komponen pendapatan daerah adalah 19,80 persen untuk pendapatan asli daerah (PAD); 7,24 persen untuk bagi hasil pajak dan bukan pajak (BHPBP); 62,66 persen untuk sumbangan dan bantuan (SUMBANT). Sedangkan rata-rata rasio pendapatan asli daerah terhadap belanja rutin adalah 28,09 persen dan terhadap belanja pembangunan adalah 116,79 persen. Rata-rata rasio kemandirian atau tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern adalah sebesar 26,84 persen. Rata-rata rasio keserasian atau prioritas alokasi dananya (APBD) pada belanja rutin dan belanja pembangunan adalah sebesar 72,41 persen dan

20,88 persen. Tingkat pertumbuhan rata-rata masing-masing komponen pendapatan dan belanja daerah adalah 22,65 persen untuk PAD; 41,30 persen untuk bantuan pemerintah pusat dan pinjaman; 104,08 persen untuk bagi hasil pajak dan bukan pajak; 44,56 persen untuk sumbangan dan bantuan (SUMBANT); 35,70 persen untuk total pendapatan daerah; 46,21 persen untuk belanja rutin dan 70,96 persen untuk belanja pembangunan.

2. Hasil penelitian pada Kabupaten Klaten : rata-rata proporsi atau komposisi masing-masing komponen pendapatan daerah adalah 5,31 persen untuk pendapatan asli daerah (PAD); 4,53 persen untuk bagi hasil pajak dan bukan pajak (BHPBP); 87,79 persen untuk sumbangan dan bantuan (SUMBANT). Sedangkan rata-rata rasio pendapatan asli daerah terhadap belanja rutin adalah 6,40 persen dan terhadap belanja pembangunan adalah 42,38 persen. Rata-rata rasio kemandirian atau tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern adalah sebesar 5,76 persen. Rata-rata rasio keserasian atau prioritas alokasi dananya (APBD) pada belanja rutin dan belanja pembangunan adalah sebesar 83,38 persen dan 12,72 persen. Tingkat pertumbuhan rata-rata masing-masing komponen pendapatan dan belanja daerah adalah 25,11 persen untuk PAD; 41,59 persen untuk bantuan pemerintah pusat dan pinjaman; 17,32 persen untuk bagi hasil pajak dan bukan pajak; 43,3 persen untuk sumbangan dan bantuan; 40,40 persen untuk total pendapatan daerah; 42,57 persen untuk belanja rutin dan 30,18 persen untuk belanja pembangunan.

3. Hasil penelitian pada Kabupaten Wonogiri : rata-rata proporsi atau komposisi masing-masing komponen pendapatan daerah adalah 8,15 persen untuk pendapatan asli daerah (PAD); 5,07 persen untuk bagi hasil pajak dan bukan pajak (BHPBP); 82,66 persen untuk sumbangan dan bantuan (SUMBANT). Sedangkan rata-rata rasio pendapatan asli daerah terhadap belanja rutin adalah 10,78 persen dan terhadap belanja pembangunan adalah 44,94 persen. Rata-rata rasio kemandirian atau tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern adalah sebesar 9,32 persen. Rata-rata rasio keserasian atau prioritas alokasi dananya (APBD) pada belanja rutin dan belanja pembangunan adalah sebesar 75,76 persen dan 17,96 persen. Tingkat pertumbuhan rata-rata masing-masing komponen pendapatan dan belanja daerah adalah 20,98 persen untuk PAD; 38,63 persen untuk bantuan pemerintah pusat dan pinjaman; 18,99 persen untuk bagi hasil pajak dan bukan pajak; 40,12 persen untuk sumbangan dan bantuan; 37,09 persen untuk total pendapatan daerah; 38,27 persen untuk belanja rutin dan 31,15 persen untuk belanja pembangunan.
4. Berdasarkan angka-angka tersebut diatas menunjukkan bahwa dalam periode 1998/1999 – 2002 Kota Surakarta dengan rata-rata total pendapatan daerahnya sebesar Rp.152.363.674.000,00 dapat dikatakan lebih mampu membiayai kebutuhan rumah tangganya jika dibandingkan dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Wonogiri. Apabila Kabupaten Klaten dibandingkan dengan Kabupaten Wonogiri yang masing-masing mempunyai rata-rata total pendapatan daerahnya sebesar Rp.218.518.537.000,00 dan Rp.187.057.541.000,00 maka, yang dapat

dikatakan lebih mampu membiayai kebutuhan rumah tangganya adalah Kabupaten Wonogiri.

B. Saran – Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran-saran yang dapat direkomendasikan adalah sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah, tingkat pertumbuhan pendapatan asli daerah harus lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan total pendapatan daerahnya.
2. Untuk meningkatkan kemampuan belanja rutin, tingkat pertumbuhan pendapatan asli daerah harus lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan belanja rutin.
3. Untuk meningkatkan kemampuan belanja pembangunan, tingkat pertumbuhan pendapatan asli daerah harus lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan belanja pembangunan.
4. Upaya konkrit yang dapat memacu peningkatan pendapatan asli daerah adalah melalui kegiatan :
 - a. Menghitung kembali potensi riil pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba perusahaan daerah dan lain-lain pendapatan yang sah secara sistematis dan rasional serta mengimplementasikannya;
 - b. Mengarahkan kegiatan pembangunan daerah kepada kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan potensi kegiatan pendapatan asli daerah;
 - c. Membentuk dan mengevaluasi strategi corporate dalam manage dan merealisir sumber pendapatan tersebut.

5. Usaha untuk mengurangi ketergantungan atas sumber dana ekstern adalah melalui:
- a. Peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari penerimaan pendapatan asli daerah yaitu dengan Pengoptimalan sumber pendapatan yang telah ada;
 - b. Meminta kewenangan yang lebih luas untuk mengelola sumber pendapatan lain yang sampai saat ini masih dikuasai pusat, misal pajak bumi dan bangunan (property tax).

